

BAB II

UNI EMIRAT ARAB DAN DINAMIKA HUBUNGAN INTERNASIONAL DENGAN ISRAEL

Bab II akan membahas dan memberikan gambaran terkait Pemerintahan Uni Emirat Arab serta gaya politik luar negeri yang dimiliki dari dulu hingga sekarang. Kemudian dalam bab ini juga dipaparkan mengenai perubahan politik luar negeri yang terjadi pada Uni Emirat Arab. Terakhir, dalam Bab ini juga akan membahas terkait dinamika hubungan antara Uni Emirat Arab dan Israel sebelum dan setelah terjadinya normalisasi hubungan diplomatik secara penuh.

2.1 Orientasi Politik Luar Negeri UEA

2.1.1 Politik Luar Negeri UEA

Uni Emirat Arab sejak diakui kemerdekaannya pada tahun 1971, dikenal sebagai sebuah negara yang terbilang masih kecil yang berusaha untuk mengamankan posisinya dalam kawasan regional yang tidak bersahabat dan mudah berubah. Dengan keadaan kawasan regional Timur Tengah pada saat itu diisi oleh negara – negara seperti Iran dan Arab Saudi yang bersaing untuk menjadi hegemon dalam regional tersebut. Sebagai negara yang baru berdiri dan diakui keberadannya oleh dunia internasional, penting bagi Uni Emirat Arab untuk memiliki gaya dan arah politik luar negeri yang sesuai dengan kondisi tersebut.

Pada masa kepemimpinan Zayed bin Sultan Al Nahyan pada tahun 1971 – 2004 merupakan sebuah masa dimana gaya dan arah politik luar negeri Uni Emirat Arab dibangun. Pada awal tahun 1971, politik luar negeri Uni Emirat Arab memiliki

tujuan untuk menjamin kelangsungan hidup dan keamanan negaranya yang baru merdeka. Selain itu tujuan lainnya adalah untuk mendukung sesama negara Arab dan Islam dalam pembangunan atau dalam konflik Arab-Israel. Selama periode ini, politik luar negeri Uni Emirat Arab dapat dikatakan ringan dan berkomitmen terhadap negara – negara Arab (Shahrour, 2020: 3). Hal tersebut dapat dilihat salah satunya pada sikap UEA terhadap Perang Irak-Iran di tahun 1980-1988 yang netral dan seimbang (Shahrour, 2020: 3). Uni Emirat Arab memilih untuk memimpin tindakan mediasi diplomatik antara perang kedua negara tersebut. Hal tersebut disebabkan dengan masih barunya lembaga – lembaga negara dalam Uni Emirat Arab dan kepribadian Zayed bin Sultan Al Nahyan yang selalu mengedepankan penyelesaian permasalahan secara damai dan menggunakan dialog terbuka (Khalid,2012: 35).

Selain itu fokus utama dalam politik luar negeri Uni Emirat Arab pada saat itu adalah mencapai keamanan negara tersebut, yang secara eksklusif menggunakan strategi *bandwagoning* (Shahrour, 2020: 3). Strategi *bandwagoning* dapat dikatakan sebagai strategi yang diambil oleh negara – negara lemah dimana negara – negara tersebut harus berteman dengan negara yang lebih kuat karena negara – negara kuat tersebut dapat menguasai apapun yang diinginkan secara paksa (*force*) (Mearsheimer,2001:163). Situasi UEA yang baru terbentuk dan terbilang lemah pada saat itu membuat UEA membutuhkan strategi politik luar negeri yang dapat mengamankan negaranya. Maka dari itu untuk mencapai keamanan negara pada saat itu, Uni Emirat Arab menggunakan strategi tersebut.

Setelah pecahnya perang antara Iran – Irak, Uni Emirat Arab kemudian bergabung dengan *Gulf Cooperation Council* (GCC) pada tahun 1981. Dengan bergabungnya Uni Emirat Arab ke GCC memberikan perlindungan bagi negara – negara kecil di kawasan Timur Tengah termasuk Uni Emirat Arab pada saat itu terhadap ancaman – ancaman eksternal yang ada. Selain itu terjalinnya kerjasama dengan Amerika Serikat pada tahun 1994 dengan menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan Bilateral, yang mengatur penempatan pasukan Amerika Serikat di pangkalan Al-Dhafra di Abu Dhabi dan memungkinkan Amerika Serikat untuk menempatkan peralatan militernya di pangkalan Uni Emirat Arab (Coates, 2017). Sebagai imbalan atas jaminan keamanan ini, Uni Emirat Arab secara aktif berpartisipasi dalam hampir semua upaya perang Amerika Serikat sejak Perang Teluk. Uni Emirat Arab dengan demikian menjadi satu-satunya negara Arab yang berpartisipasi dengan AS dalam enam aksi koalisi selama 20 tahun terakhir yakni Afghanistan, Libya, Somalia, Bosnia, Kosovo, Perang Teluk 1990 dan perang melawan ISIS (UAE Embassy, 2012). Akan tetapi upaya ini tidak dapat dilihat sebagai bentuk ketegasan dari Uni Emirat Arab. Sebaliknya, upaya ini harus dipahami sebagai produk aliansi UEA dengan Amerika Serikat.

2.1.2 Pergesaran Orientasi Polugri UEA

Kemudian semenjak tahun 2004, arah dan gaya politik luar negeri yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab yang mengutamakan soft power tidak bertahan lama, hal tersebut disebabkan karena meninggalnya Zayed bin Sultan Al Nahyan pada tanggal 2 November 2004 (Shahrour, 2020: 5). Pada era yang baru ini Uni Emirat Arab telah berkembang pesat menjadi negara yang berhasil melampaui kondisi

geopolitiknya terutama dalam kawasan regional. UEA mulai bertindak tegas dan menunjukkan dominasinya di kancah internasional untuk mempromosikan kepentingannya sendiri dan untuk membentuk kembali tatanan regional. Maka dari itu politik luar negeri Uni Emirat Arab mulai menerapkan arah dan gaya politik luar negeri yang tegas, kuat, dan lebih mandiri dibandingkan sebelumnya (Shahrour, 2020: 6). Politik luar negeri Uni Emirat Arab yang baru ini secara khusus memiliki lima kebijakan utama yakni (i) menekan Persaudaraan Muslim dan kelompok Islam lainnya, termasuk al-Qaeda dan Negara Islam; (ii) menahan pengaruh Iran sebanyak mungkin, dengan prioritas diberikan kepada semenanjung Arab; (iii) mencapai pengaruh dalam ekonomi dunia dengan memposisikan dirinya sebagai “negara penghubung”; (iv) meraih tempat di pentas dunia; (v) dan, yang terakhir, diversifikasi perjanjian dan kerja sama keamanan dan pertahanan. Politik luar negeri Uni Emirat Arab yang seperti ini bertahan dalam periode waktu yang cukup lama yaitu sejak tahun 2004 hingga tahun 2020 (Shahrour, 2020: 7-8).

Pergeseran mendasar yang dialami oleh politik luar negeri Uni Emirat Arab dimungkinkan oleh lima dinamika berbeda, yang perlahan, namun secara lebih dalam, dianggap mengubah proses pengambilan keputusan Uni Emirat Arab, lingkungan regional dan internasional negara tersebut. Beberapa faktor penyebabnya yaitu (Shahrour, 2020: 5-7):

1. Pertama, setelah mengalami pergantian kepemimpinan dibawah Abdullah bin Zayed Al Nahyan sebagai Menteri Urusan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Uni Emirat Arab, terdapat perubahan dalam fokus kekuasaan dan asumsi kepemimpinan negara Uni Emirat

Arab menjadi lebih kuat. Dinamika ini awalnya muncul karena adanya generasi baru yang berkuasa setelah meninggalnya Sheikh Maktoum pada tanggal 7 Oktober 1990. Generasi baru tersebut berambisi untuk mengubah Uni Emirat Arab menjadi negara global yang berfokus untuk meningkatkan kekuatan ekonomi dibandingkan dominasi secara politik. Dengan adanya pergeseran generasi dan kepemimpinan dalam Uni Emirat Arab, hal tersebut menyebabkan adanya perubahan yang radikal dari politik luar negeri negara tersebut.

2. Adanya perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab menjadi lebih kuat dan tegas juga disebabkan oleh faktor kepribadian dari pemimpinnya yaitu Abdullah bin Zayed Al Nahyan. Sebagai seorang mantan militer yang menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Bersenjata Emirat Pasukan 1993-2004, Abdullah bin Zayed Al Nahyan memegang Pandangan Hobbesian dalam dunia internasional dan sangat percaya pada efisiensi alat militer untuk memecahkan perbedaan politik. Hal tersebut menunjukkan asal usul politik luar negeri Uni Emirat Arab yang lebih kuat dibandingkan sebelumnya. Di bawah kepemimpinannya, Uni Emirat Arab memperkenalkan wajib militer pada Juni 2014 dan menerapkan kebijakan untuk mendorong kualitas tinggi. Selain itu Abdullah bin Zayed Al Nahyan juga merupakan pemimpin yang ambisius, dimana ia ingin menjadikan Uni Emirat Arab sebagai negara dengan kekuatan terbesar dalam kawasan regionalnya dan memiliki jangkauan luas dengan dunia internasional. Dengan memiliki sifat yang

sangat ambisius, Abdullah bin Zayed Al Nahyan menjunjung tinggi visi global untuk negaranya, yang dengan fasih dijuluki "*Dubai Port World Vision*" oleh Rory Miller dan Harry Verhoeven. Pandangan tersebut mengubah Uni Emirat Arab secara keseluruhan menjadi pusat komersial dan perekonomian dominan yang menghubungkan kawasan timur dan barat dalam dunia internasional. Sifat lainnya dari Abdullah bin Zayed Al Nahyan yang berpengaruh terhadap perubahan tersebut adalah ambisinya untuk membangun Uni Emirat Arab yang berdasarkan dua pilar yakni liberalisme (ekonomi) dan ultra-otoritarianisme (sekuler).

3. Salah satu peristiwa yang mempengaruhi perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab adalah tren kenaikan harga minyak internasional yang terjadi sejak tahun 2008 – 2014. Uni Emirat Arab sebagai salah satu aktor dalam dunia internasional yang memiliki peran penting dalam pasar minyak mendapatkan banyak keuntungan dengan adanya peningkatan harga minyak internasional. Kenaikan harga barel minyak dari US\$20 pada tahun 2002 menjadi lebih dari US\$140 pada tahun 2008, dan stabilisasinya pada kisaran US\$100 hingga 2014 merupakan keuntungan yang cukup besar bagi Uni Emirat Arab. Dengan adanya peningkatan tersebut sumber daya keuangan Uni Emirat Arab meroket dan kemudian dikelola oleh *Abu Dhabi Investment Authority* (ADIA). Aset ini diperkirakan telah tumbuh dari sekitar US\$100-200 miliar pada akhir abad ke-20 menjadi \$627 miliar pada tahun 2013, dan mencapai puncaknya saat ini pada US\$875 miliar, sehingga menjadikan ADIA

sebagai *Sovereign Wealth Funds* (SWF) terbesar kedua hingga ketiga di dunia.

4. Faktor lainnya yang mempengaruhi perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab adalah perubahan perekonomian dalam lingkungan regional dan internasional yang lebih condong ke arah Timur. Pergeseran ini pertama kali mendorong Uni Emirat Arab untuk menginternasionalkan politik luar negerinya dan untuk memperkuat hubungannya dengan negara – negara di Asia, sebagaimana digariskan dalam visi global Mohammed bin Zayed untuk Uni Emirat Arab. Selanjutnya, kenaikan ini juga memiliki dampak besar pada geopolitik Timur Tengah dengan mendorong penarikan Amerika Serikat yang lambat namun struktural dari Timur Tengah. Pergeseran ini dimulai di bawah pemerintahan Obama dengan kebijakan “*pivot to Asia*”, yang secara konkret berarti bahwa Amerika Serikat akan meninggalkan dukungan tanpa syaratnya untuk negara – negara Timur Tengah. Akibatnya, Uni Emirat Arab berusaha untuk mengadopsi politik luar negeri yang lebih mandiri dan memperjuangkan kepentingan nasional dari negaranya.
5. Pecahnya peristiwa Arab Spring pada tahun 2011 juga menjadi salah satu faktor yang menyebabkan adanya perubahan politik luar negeri Uni Emirat Arab. Adanya peristiwa Arab Spring tersebut merubah kondisi lingkungan dari kawasan regional tersebut, sehingga menyebabkan Uni Emirat Arab untuk menerapkan kebijakan yang “melawan segala

rintangan”, sebuah tatanan politik lama yang ditegakkan dan bahkan diperkuat dengan mengintegrasikan negara-negara otoriter lainnya wilayah Barat, seperti Libya dan Suriah.

Sehingga dapat dilihat bahwa peristiwa – peristiwa tersebut menjadi faktor yang mengubah politik luar negeri Uni Emirat Arab sejak tahun 2004 – 2020 (Henderson, 2017). Uni Emirat Arab kemudian berfokus menjadi sebuah “*nexus state*” atau negara penghubung antara negara – negara di kawasan timur dan barat secara komersial dan finansial. Secara internasional, Uni Emirat Arab telah berusaha untuk memperkuat hubungan perekonomiannya dengan Eropa, Afrika Timur dan Asia. Hal tersebut dilakukan untuk menegaskan dominasinya sebagai pusat komersial dan keuangan utama di Timur Tengah, terutama sejak meningkatnya persaingan yang dihasilkan dari negara – negara tetangganya. Selain itu Uni Emirat Arab juga telah berhasil meningkatkan hubungan signifikan dengan China dalam proyek *Belt and Road Initiative* pada September 2013 (Bhattacharya, 2019). Politik luar negeri UEA yang telah diterapkan ini mengalami banyak kesuksesan dan membawa negara tersebut menjadi salah satu kekuatan yang cukup berpengaruh dalam dunia internasional.

Tetapi berdasarkan kenyataan yang ada, politik luar negeri Uni Emirat Arab tidak selalu berjalan baik, seperti misalnya beberapa tahun belakangan ini UEA mengalami berbagai kemunduran dan tantangan. Hal tersebut dilihat dari situasi jangka panjang yang dimiliki oleh negara tersebut. Salah satu kemunduran yang dihadapi adalah adanya permasalahan struktural yang menghambat Uni Emirat Arab untuk mempertahankan politik luar negerinya dalam jangka panjang.

Permasalahan – permasalahan tersebut disebabkan oleh beberapa hal seperti rentannya keamanan negara karena keterlibatan dalam Perang Yaman. Kelompok Houthi yang menjadi salah satu aktor dalam Perang Yaman telah menjadi ancaman secara langsung bagi Uni Emirat Arab walaupun memiliki jarak yang cukup jauh (Shahrour, 2020: 8). Hal tersebut ditunjukkan dengan serangkaian serangan oleh Houthi terhadap Uni Emirat Arab. Sejauh ini, Houthi telah melaksanakan tiga kali serangan yakni terhadap pembangkit nuklir Barakah Uni Emirat Arab yang saat itu sedang dibangun pada tanggal 3 Desember 2017, Bandara Internasional Abu Dhabi pada tanggal 27 Juli 2018, dan Bandara Internasional Dubai pada tanggal 30 September 2018 (CNBC, 2022). Selain itu, Houthi juga beberapa kali mengancam Uni Emirat Arab secara eksplisit untuk meluncurkan rudal ke arah UEA.

Selain adanya konflik dengan Houthi, Uni Emirat Arab juga terjebak dalam situasi baku tembak antara Amerika Serikat dan Iran pada tahun 2018 – 2020. Pada tanggal 12 Mei 2019, empat kapal tanker minyak milik Uni Emirat Arab, Arab Saudi dan Norwegia diserang di perairan teritorial Uni Emirat Arab (BBC NEWS, 2019). Meskipun Iran belum mengklaim serangan tersebut, Amerika Serikat secara eksplisit menyalahkan negara tersebut atas serangan – serangan yang terjadi. Tetapi kemudian Uni Emirat Arab berhenti menyalahkan Iran dengan hanya mengatakan serangan itu kemungkinan dilakukan oleh "aktor negara". Sebagai akibat dari meningkatnya ketegangan ini, Uni Emirat Arab mulai mengurangi permusuhannya terhadap Iran. Dengan adanya dua kemunduran besar diatas, politik luar negeri yang dimiliki oleh Uni Emirat Arab kemudian dipertanyakan keberlanjutannya.

Dengan adanya berbagai kemunduran dan permasalahan yang terjadi diakibatkan oleh politik luar negeri yang diterapkan oleh Uni Emirat Arab, berdasarkan data yang ada pada tahun 2021, mulai terjadi perubahan kembali dalam politik luar negeri Uni Emirat Arab. Uni Emirat Arab meninjau kembali tujuan kebijakan luar negerinya dengan tujuan meningkatkan kemitraan perdagangan globalnya dan memastikan keamanan dan stabilitas politiknya, dengan mengganti intervensi militer yang kuat dan politik proksi dengan dialog dan diplomasi. Kunjungan terbaru yang dilakukan oleh Uni Emirat Arab ke Iran mencerminkan perubahan penting dalam politik luar negeri Uni Emirat Arab terhadap tetangga regionalnya. Negara tersebut tampaknya mengadopsi pendekatan yang lebih pragmatis demi keamanan dan keuntungan ekonominya. Dalam pertemuannya dengan pejabat Iran di Teheran pada 6 Desember 2021, Sheikh Tahnoun menyampaikan undangan kepada Ibrahim Raisi, presiden Iran, untuk mengunjungi UEA. Mengutip perkataan Tahnoun bahwa kunjungan itu akan menjadi "titik balik" bagi hubungan kedua negara (Shahrour, 2020). Hal tersebut menjadi langkah yang cukup besar mengingat tidak pernah ada presiden Iran yang mengunjungi UEA sejak 2007.

Seperti yang diketahui, Uni Emirat Arab sejak lama telah memandang Iran sebagai salah satu negara dengan ancaman terbesar bagi keamanan nasionalnya, terutama karena potensi kepemilikan senjata nuklir Iran. Namun, dengan pemulihan hubungan dengan Iran dan Turki, Uni Emirat Arab menggunakan pendekatan yang lebih pragmatis dalam menjalankan kebijakan luar negerinya untuk memastikan keamanan nasionalnya. Hal tersebut disebabkan karena Uni Emirat Arab mulai

menyadari bahwa kurangnya dialog bilateral yang sehat dengan kekuatan regional akan membuat kemajuan menuju de-eskalasi jauh lebih sulit. Negara ini mengakui, setelah satu dekade konflik regional dan politik proksi, bahwa kebijakan yang berbeda dari para pemain regional seharusnya tidak menghalangi kerja sama diplomatik.

Perubahan terbaru dalam politik luar negerinya juga ditunjukkan saat Uni Emirat Arab memaparkan pondasi strategisnya untuk 50 tahun kedepan, dimana lebih berfokus pada solusi diplomatik dan kekuatan lunak untuk mengkonsolidasikan kepentingan ekonomi dan kemitraan perdagangannya. Didorong oleh kebutuhan untuk memprioritaskan kemakmuran ekonomi dan kesadaran yang berkembang bahwa masalah keamanan bersama paling baik ditangani secara kolektif, visi kebijakan pragmatis baru muncul dan menggantikan satu dekade pendekatan konfrontatif dan polarisasi politik yang berlebihan. Sehingga dapat dilihat bahwa dalam dua tahun terakhir ini Uni Emirat Arab telah mempertimbangkan dan memulai langkah untuk melakukan perubahan besar dalam politik luar negerinya. Perubahan politik luar negeri yang terjadi ini juga menjelaskan mengapa pada akhirnya Uni Emirat Arab bersedia untuk melakukan normalisasi hubungan diplomatik dengan Israel.

2.2 Hubungan UEA dengan Israel

Uni Emirat Arab dan Israel adalah negara yang memiliki hubungan yang cukup rumit. UEA sebenarnya tidak pernah berperang melawan Israel secara langsung, akan tetapi berbagai kebijakan yang dikeluarkan UEA menunjukkan

ketidaksepahaman serta perlawanan terhadap Israel. Pada dasarnya UEA memiliki letak geografis yang cukup jauh dari Israel karena terletak di pantai selatan Teluk Persia. Dengan kondisi geografis yang cukup jauh tersebut menjadikan kemungkinan munculnya konflik antar kedua negara tersebut sangatlah kecil.

Israel menjadi satu-satunya negara di kawasan Timur Tengah yang bermayoritas masyarakat non-Islam. Hal tersebut menjadikan UEA dan negara-negara Arab lainnya yang memiliki latar belakang agama Islam memiliki pandangan bahwa Israel sebagai negara Yahudi yang merupakan musuh bagi agama Islam (Andi dan Zaenal, 2016). Ancaman keamanan yang dilakukan oleh Israel di berbagai wilayah di Timur Tengah dianggap berkaitan dengan perjuangan negara-negara Arab untuk membebaskan Palestina dari kekusaan Israel. Hal tersebut menjadikan penyelesaian konflik antara Israel dan Palestina sebagai salah satu prioritas kebijakan luar negeri negara-negara Islam di wilayah Timur Tengah khususnya UEA (Weiss, 2007).

Sejak terbentuknya organisasi GCC (Gulf Cooperation Council) negara-negara anggota termasuk UEA dengan tegas menentang posisi Israel yang menduduki wilayah Palestina. Selain kecaman yang diberikan UEA terhadap kebijakan Israel, UEA juga selalu mendukung berbagai inisiatif perdamaian yang hadir dalam penyelesaian masalah ini baik dari lingkup regional maupun internasional, salah satunya yaitu dukungan terhadap *Arab Peace Initiative*. UEA dan negara GCC memandang solusi dua negara tersebut antara Palestina dan Israel sebagai kunci untuk penyelesaian konflik diantara kedua negara tersebut (Rabi & Mueller, 2017). UEA dan negara-negara Teluk lainnya menganggap penyelesaian

konflik sebagai sumber lahirnya stabilitas di lingkup regional Timur Tengah dan untuk menghilangkan gerakan radikal yang beroperasi di kawasan Timur Tengah.

Sejak didirikan, UEA sudah mendukung keputusan Liga Arab dan GCC terkait Israel. Sebagai anggota Liga Arab, UEA menolak untuk mengakui Israel, dan secara resmi melarang masuk masyarakat Israel ke dalam wilayah UEA sesuai dengan kebijakan boikot terhadap Israel oleh Liga Arab. Hubungan UEA dan Israel telah dingin selama beberapa dekade, tetapi pada 2010-an, hubungan informal kedua negara meningkat pesat dan mulai terlibat dalam kerjasama tidak resmi yang luas berdasarkan penentangan bersama terhadap program nuklir Iran dan pengaruh regional. Pada tahun 2015, Israel membuka misi diplomatik resmi di Abu Dhabi kepada Badan Energi Terbarukan Internasional.

Sebelum UEA, dua negara Arab lainnya, yang telah membuka hubungan diplomatik dengan Israel adalah Mesir pada tahun 1979 dan Yordania pada tahun 1994. Dengan demikian, UEA menjadi negara Arab ketiga yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Tidak lama setelah itu di tahun yang sama Bahrain juga kemudian mengikuti langkah UEA sehingga negara Teluk itu menjadi negara keempat yang melakukan normalisasi hubungan dengan Israel. Kesepakatan antara UEA dengan Israel di bawah Perjanjian Abraham sebenarnya belum bisa dikonfirmasi sebagai putusan akhir, karena masih ada beberapa isu yang harus dinegosiasikan sebelum kesepakatan akhir ditandatangani.

Dalam pemanasan signifikan hubungan resmi UEA dan Israel secara resmi sepakat pada Agustus 2020 untuk "menormalkan" hubungan dalam kesepakatan

yang ditengahi Amerika Serikat yang juga mengharuskan Israel untuk menghentikan rencananya untuk mencaplok bagian dari wilayah tersebut. Tepi Barat, termasuk Lembah Yordan. Sebuah pernyataan bersama yang dikeluarkan oleh UEA, Israel dan Amerika Serikat mengatakan bahwa ketiga negara telah “menyetujui normalisasi penuh hubungan antara Israel dan Uni Emirat Arab”. Upacara penandatanganan normalisasi tersebut diadakan pada 15 September 2020.

2.2.1 Peristiwa Perang Arab-Israel: Dorongan Hubungan UEA dan Israel

GCC (Gulf Cooperation Council) merupakan suatu aliansi ekonomi dan politik yang dibentuk oleh negara – negara Arab penghasil minyak diantaranya Kuwait, Bahrain, Uni Emirat Arab, Oman, Qatar, dan Arab Saudi (Secretariat of GCC). UEA mendukung formula Konferensi Madrid 1991 di dalam GCC untuk menyelesaikan perselisihan Arab-Israel melalui negosiasi langsung oleh para pihak yang bersangkutan. Selain dukungan politik, UEA juga telah memberikan beberapa bantuan keuangan kepada Palestina, dan telah memutuskan, bersama dengan anggota GCC lainnya, untuk menghilangkan boikot sekunder dan tersier terhadap Israel untuk memfasilitasi proses perdamaian.

Pada dasarnya UEA menginginkan berhasilnya proses perdamaian antara Arab-Israel terkait Palestina, akan tetapi UEA bersikap berhati-hati dalam proses dukungan tersebut. Bersama dengan sebagian besar dunia Arab, termasuk GCC, telah menolak untuk menghilangkan boikot utama terhadap Israel. UEA juga menolak untuk menjadi tuan rumah konferensi proses perdamaian multilateral yang mencakup Israel, dan belum setuju untuk bergabung dengan bank pembangunan

Timur Tengah, yang dipromosikan oleh Amerika Serikat sebagai tambahan ekonomi untuk negosiasi politik. Dukungan keuangannya, juga, sebagian besar, telah diberikan dengan ketentuan yang hati-hati untuk memastikan kepastian dalam proses penggunaannya.

UEA dianggap memiliki beberapa alasan terhadap pendekatan hati-hati ini diantaranya pemerintah UEA ingin melihat konflik Arab-Israel diakhiri dengan cara yang memuaskan pihak-pihak Arab, dan mengakui bahwa upaya saat ini mungkin dapat melakukannya. Di sisi lain, konflik yang sudah berlangsung lama ini begitu rumit dan memiliki tingkat kompleksitas yang sangat tinggi, sehingga UEA tidak yakin upaya yang dilakukan dapat membuahkan hasil. Pada tahun 1995 ketika Amerika Serikat memberikan hak veto di Dewan Keamanan PBB terhadap resolusi yang didukung Arab yang mengutuk Israel atas perampasan tanah di Yerusalem, dan ketika anggota terkemuka Senat AS mendesak untuk memindahkan kedutaan AS ke Yerusalem, menentang Keinginan Arab, UEA menjadi khawatir bahwa hal ini menunjukkan kembalinya sikap yang di anggap sebagai bias anti-Arab dalam kebijakan AS, dan ini meningkatkan kehati-hatian UEA dalam mendukung proses perdamaian (Middle East Policy IV, 1995). Hal tersebut membuat UEA harus lebih berhati-hati terhadap kebijakan yang akan di ambil.

2.2.2 Peristiwa Normalisasi Hubungan Uni Emirat Arab dan Israel

UEA dan Israel sebelum memiliki hubungan diplomatik secara resmi sudah menjalin beberapa kerjasama dan pejabat kedua negara diketahui beberapa kali melakukan pertemuan. Seperti misalnya pada bulan September 2012 dalam sidang

umum PBB di New York, Menteri Luar Negeri UEA, Sheikh Abdullah bin Zayed al-Nahyan dan Perdana Menteri Israel, Netanyahu melakukan pertemuan yang diadakan secara rahasia. Kejadian tersebut terbongkar setelah beberapa tahun kemudian salah satu media Israel yaitu Haaretz melaporkan kejadian tersebut (Ravid, 2017). Dalam pertemuan tersebut kedua negara membahas terkait kepentingan bersama terkait kegagalan rencana pengembangan nuklir Iran.

Pada bulan-bulan menjelang perjanjian, Israel telah bekerja secara rahasia dengan UEA untuk memerangi pandemi COVID-19 (The New York Times, 2020). Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, melaporkan pada akhir Juni 2020 bahwa kedua negara bekerja sama untuk memerangi virus corona dan bahwa kepala Mossad, Yossi Cohen, telah melakukan perjalanan beberapa kali ke UEA. Namun, UEA berdalih bahwa hal tersebut hanyalah urusan di antara perusahaan swasta dan bukan di tingkat negara bagian (The New York Times, 2020).

Dalam banyak hal benih-benih hubungan tersebut mulai dapat terlihat terutama pada saat Arab Spring, ketika orang-orang Arab dan pemerintah mulai memutuskan bahwa ancaman utama negara mereka adalah internal dan bukan eksternal. Semakin banyak orang Arab tampaknya merasa bahwa konflik Arab-Israel adalah gangguan politik bagi negaranya. Selain itu, pemerintah Israel dan UEA berbagi berbagai masalah keamanan. Kedua negara tersebut melihat Iran sebagai ancaman keamanan yang serius dan abadi. Dalam beberapa tahun terakhir, hubungan informal kedua negara semakin menghangat dan mereka terlibat dalam kerja sama tidak resmi yang luas berdasarkan penentangan bersama terhadap program nuklir Iran dan pengaruh regional lainnya.

Dalam pengumuman bersama yang tidak terduga oleh Amerika Serikat, Israel, dan UEA pada 13 Agustus 2020, Israel dan UEA “menyetujui normalisasi penuh hubungan.” Kesepakatan itu ditandatangani pada 13 Agustus 2020, antara Presiden Donald Trump, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Sheikh Mohammed Bin Zayed, putra mahkota Abu Dhabi. Kesepakatan itu, dikenal sebagai *Abraham Accord* (Kesepakatan Abraham) yang ditengahi oleh penasihat senior Jared Kushner, Duta Besar AS untuk Israel David Friedman, Menteri Luar Negeri Mike Pompeo, utusan Timur Tengah Avi Berkowitz, dan penasihat keamanan nasional Gedung Putih Robert O' Brien.

Perwakilan dari UEA dan Israel akan bertemu untuk menandatangani perjanjian bilateral mengenai berbagai sektor investasi, pariwisata, penerbangan langsung, keamanan, telekomunikasi dan masalah lainnya (Israel Ministry of Foreign Affairs, 2021). Kedua negara tersebut juga akan membuka kedutaan dan bertukar duta besar. Selain itu penerbangan dari Abu Dhabi ke Tel Aviv juga direncanakan akan membawa peziarah mengunjungi Masjid Al-Aqsha di Yerusalem (The Times of Israel, 2020). Beberapa hari kemudian, UEA membatalkan undang-undangnya untuk memboikot Israel, yang telah diberlakukan sejak tahun 1972 tetapi tidak ditegakkan dalam beberapa tahun terakhir.

Duta Besar UEA untuk Amerika Serikat Yousef Al Otaiba merilis pernyataan yang menyebut perjanjian itu “kemenangan bagi diplomasi dan kawasan” dan “kemajuan signifikan dalam hubungan Arab-Israel yang menurunkan ketegangan dan menciptakan energi baru untuk perubahan positif.” Dia menambahkan bahwa langkah itu “segera menghentikan pencaplokkan dan potensi eskalasi kekerasan. Ini

mempertahankan kelangsungan hidup solusi dua negara seperti yang didukung oleh Liga Arab dan komunitas internasional. Ini menciptakan dinamika dan kemungkinan baru dalam proses perdamaian.” Dalam Tweetnya Al Otaiba mengatakan bahwa:

“Today’s announcement to fully normalize relations between Israel and the United Arab Emirates is a win for diplomacy and for the region that lowers tensions and creates new energy for positive change.” (UAE Embassy US, 2020)

UEA juga dilaporkan mendapatkan komitmen dari pemerintah bahwa Amerika Serikat tidak akan mengakui pencaplokan Israel atas bagian-bagian Tepi Barat hingga setidaknya 2024. Namun demikian, Otaiba mengantisipasi kemarahan yang dialami Palestina ketika dia men-tweet, “UEA akan tetap menjadi pendukung kuat dari Rakyat Palestina, untuk martabat mereka, hak-hak mereka dan negara berdaulat Palestina sendiri. Palestina harus mendapat manfaat dari normalisasi. Kami akan secara tegas mengadvokasi tujuan ini, sekarang secara langsung dan didukung dengan insentif yang lebih kuat, opsi kebijakan, dan alat diplomatik.”

“The UAE will remain a strong supporter of the Palestinian people – for their dignity, their rights and their own sovereign state. They must benefit from normalization. We will forcefully advocate for these ends.” (UAE Embassy US, 2020)

Salah satu aspek mencolok dari perkembangan ini adalah kurangnya protes di dunia Arab. Orang-orang Palestina mengecam perjanjian itu tetapi demonstrasi publik diredam di Tepi Barat dan hampir tidak ada di wilayah lainnya. Liga Arab menolak permintaan Otoritas Palestina untuk mengadakan pertemuan darurat untuk membahas kesepakatan UEA-Israel. Hanya Iran dan Turki yang menentang kesepakatan damai Israel-UEA.

2.3 Kesimpulan

Dapat dilihat bahwa UEA telah banyak mengalami perubahan yang sangat besar sejak kemerdekaannya di tahun 1971. UEA menunjukkan bagaimana politik dan pemerintahan berjalan dengan sistem yang dibuat sedemikian rupa untuk menyatukan dan mempertahankan setiap emirat hingga pada akhirnya dapat bersatu sebagai satu kesatuan sebagai negara Uni Emirat Arab. Dalam kebijakan luar negeri sejak kepemimpinan Sheikh Zayed kebijakan luar negeri ditujukan untuk memastikan kelangsungan hidup dan keamanan negara yang baru merdeka dan untuk mendukung sesama Arab dan Islam. Akan tetapi dengan seiring berjalannya waktu arah kebijakan luar negeri tersebut berubah dan hingga pada akhirnya mengarah pada Normalisasi Hubungan Diplomatik secara penuh dengan Israel. Apa yang kita saksikan saat ini mungkin adalah awal dari proses penyempurnaan kebijakan luar negeri UEA yang lambat, yang hasilnya mungkin berupa perilaku eksternal yang lebih keras di lingkungan regional negara itu, dan perilaku tegas untuk membangun dominasi regional.